

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 *tentang Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Peta Jalan RB BKKBN Tahun 2015-2019
2. Peta Jalan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas
3. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.
4. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut dengan POKJA RB adalah kelompok jabatan yang

diberi tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

5. Rencana Aksi adalah merupakan penjabaran dari program Pelaksanaan RB
6. *Quick Wins* adalah suatu kegiatan inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit dalam rangka pelaksanaan RB
7. Asessor adalah pejabat tinggi pertama yang memberikan penilaian atas kinerja instansi berdasarkan indikator dalam pelaksanaan tugas

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan RB BKKBN untuk:

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b) membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan RB adalah.

- a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Pertama

Arah Kebijakan

Pasal 4

Arah kebijakan RB yang dilaksanakan BKKBN 2015-2019 merujuk pada arah kebijakan RB dalam menjalankan janji

Nawacita

Pasal 5

Janji Nawacita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- b. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- c. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; dan
- d. Melakukan revolusi karakter bangsa

Bagian Kedua

Prinsip Reformasi Birokrasi BKKBN

Pasal 6

Dalam melaksanakan RB mendasarkan pada prinsip – prinsip yang terdiri atas:

- a. Orientasi hasil jangka panjang;
- b. terukur;
- c. efisien dan efektif;
- d. Realistik;
- e. Konsisten;
- f. Sinergi;
- g. Inovatif;
- h. Kepatuhan; dan
- i. dimonitor.

Bagian Ketiga

Sasaran Reformasi Birokrasi BKKBN

Pasal 7

Sasaran strategis program RB BKKBN tahun 2015-2019 disusun berdasarkan tiga sasaran RB nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Pasal 8

Sasaran strategis program RB BKKBN tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
- b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- d. Peningkatan transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
- e. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi BKKBN dan peningkatan kualitas implementasinya;
- f. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
- g. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*;
- h. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
- i. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- j. Peningkatan kualitas kebijakan publik;
- k. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;
- l. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;
- m. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
- n. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan; dan
- o. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Bagian Keempat
Ukuran Keberhasilan

Pasal 9

Dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran RB BKKBN 2015-2019, ditetapkan ukuran keberhasilan yang dirumuskan sebagai berikut

- a. Opini WTP Atas laporan keuangan
- b. Meningkatnya Tingkat Kapabilitas APIP
- c. Penguatan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
- d. Instansi Pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP)
- e. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
- f. Meningkatnya Indeks Kompetensi ASN BKKBN
- g. Meningkatnya Indeks *e-Government* BKKBN
- h. Meningkatnya Indeks Integritas BKKBN
- i. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KKBPK
- j. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik

BAB IV

AREA PERUBAHAN DAN HASIL

Bagian Pertama

Area Perubahan

Pasal 10

- (1) Area perubahan adalah upaya untuk mewujudkan pencapaian sasaran RB
- (2) Area Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Mental Aparatur
 - b. Pengawasan
 - c. Akuntabilitas
 - d. Kelembagaan
 - e. Tata Laksana
 - f. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
 - g. Peraturan Perundang-undangan
 - h. Pelayanan Publik

- (3) Area Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kedalam Rencana Aksi RB dalam rangka mewujudkan area perubahan

Bagian Kedua
Hasil Yang Diharapkan

Pasal 11

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah:

- a. Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
- b. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap unit organisasi
- c. Meningkatnya integritas aparatur BKKBN
- d. Meningkatnya profesionalisme aparatur BKKBN
- e. Meningkatnya citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat
- f. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan KKBPK

Pasal 12

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:

- a. Meningkatnya kapasitas APIP
- b. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
- c. Meningkatnya penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- d. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
- e. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur BKKBN
- f. Meningkatnya hasil penilaian opini oleh BPK, dan secara konsisten mempertahankan opini WTP

Pasal 13

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
- b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional
- c. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja
- d. Meningkatnya akuntabilitas aparatur BKKBN

Pasal 14

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah:

- a. Tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi
- b. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan diantara unit kerja di kantor pusat maupun dengan kantor Perwakilan BKKBN Provinsi
- c. Meningkatnya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi dan sinergisme (KISS) kelembagaan antara Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia
- d. Meningkatnya kinerja aparatur BKKBN

Pasal 15

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah:

- a. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*
- b. Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia
- c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
- d. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pasal 16

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:

- a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- b. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
- c. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
- d. Membentuk *talent pool* (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungan BKKBN; dan
- e. Mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi;
- f. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDM aparatur; dan Meningkatnya profesionalisme aparatur

Pasal 17

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah:

- a. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan
- b. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Pasal 18

Hasil yang diharapkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f adalah:

- a. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi

- terhadap kinerja pelayanan publik
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

BAB V
STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Pertama
Strategi Pelaksanaan

Pasal 19

strategi Pelaksanaan RB-BKKBN bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pokja baik di tingkat Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi

Pasal 20

Strategi Pelaksanaan RB-BKKBN terdiri atas:

- a. Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan pada RB BKKBN periode kedua tahun 2015-2019;
- b. Penilaian terhadap rasionalisasi dan peluang untuk pencapaiannya;
- c. Perbaikan berkesinambungan dalam rangka menjaga agar terjadi keseimbangan antara aktivitas yang dijalankan dengan alokasi yang direncanakan.

Bagian Pertama
Program Reformasi Birokrasi

Pasal 21

Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh BKKBN berdasarkan pada area perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:

(1) Mental Aparatur terdiri atas:

- a. mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta melayani secara

berkualitas;

- b. membentuk *Agent of Change* di masing-masing unit kerja dan Perwakilan BKKBN di setiap provinsi;
- c. mendorong, memberikan teladan, hingga melakukan perubahan terhadap sistem dan prosedur kerja, termasuk perilaku positif yang harus dijalankan untuk mendukung pelaksanaan kerja yang profesional.

(2) Pengawasan terdiri atas:

- a. memelihara, meningkatkan, dan memperkuat pencegahan berbagai potensi penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas birokrasi;
- b. meningkatnya kualitas penanganan pengaduan;
- c. memperkecil temuan benturan kepentingan;
- d. meningkatnya jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBK;
- e. meningkatnya penerapan SPIP dan kapasitas APIP di BKKBN.
- f. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. Meningkatkan pelaksanaan SPIP dan kapsistas APIP di seluruh unit kerja yang ada di BKKBN.

(3) Akuntabilitas terdiri atas:

- a. Memperluas unit organisasi yang menggunakan e-procurement dan e-catalog dalam menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKKBN;
- b. Meningkatkan kualitas pengelola pengadaan barang/jasa yang akuntabel, transparan, dan profesional;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara, sehingga tercipta sistem yang lebih akuntabel, handal, dan terpercaya;

(4) Kelembagaan terdiri atas:

- a. Mengintegrasikan sistem manajemen kinerja BKKBN, khususnya integrasi antara sasaran organisasi dengan

- capaian kinerja individu;
- b. melaksanakan evaluasi kelembagaan sehingga terjadi perubahan birokrasi kerja yang lebih efektif dan efisien, serta melayani secara berkualitas;
 - c. meningkatkan akurasi kelembagaan yang lebih tepat ukuran, tepat fungsi, dan terjadi sinergi kelembagaan yang efektif dan efisien;
 - d. Melakukan reorganisasi yang lebih mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi BKKBN.

(5) Tata Laksana terdiri atas:

- a. menciptakan kejelasan tatalaksana dan proses bisnis BKKBN;
- b. Merumuskan proses bisnis BKKBN sesuai dengan perubahan organisasi;
- c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap TIK BKKBN menuju sistem manajemen BKKBN yang terintegrasi;
- d. Mengembangkan e-government.

(6) Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. menerapkan sistem manajemen ASN yang meliputi: perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan, dan pemberdayaan hingga pemberhentian;
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan sesuai organisasi baru BKKBN, serta yang lebih menggambarkan beban kerja riil;
- c. Redistribusi pegawai berdasarkan kompetensi;
- d. Meningkatkan pembinaan disiplin pegawai;
- e. Menerapkan Sistem manajemen talenta;
- f. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis online
- g. mengembangkan sistem manajemen karier BKKBN;
- h. Meningkatkan kualitas pengembangan dan pemberdayaan pegawai melalui pengembangan kompetensi pegawai.

(7) Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. menghilangkan tumpang tindih dan disharmonis peraturan perundang-undangan di bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- c. Memperkuat pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga mampu bersinergi dengan aktivitas pembangunan bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- d. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

(8) Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari segi sistem dan prosedur maupun teknologi;
- b. Menyempurnakan proses bisnis dan SOP pelayanan publik;
- c. Melakukan Pemetaan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh unit di BKKBN;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik BKKBN secara berkesinambungan.

BAB VI

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Bagian Pertama

Quick Wins

Pasal 22

Quick Wins digunakan sebagai program inisiasi awal sebelum sebuah program dan kegiatan dalam seluruh area perubahan pada kurun waktu 2015-2019 dijalankan.

Pasal 23

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan quick wins reformasi birokrasi adalah:

- a. Pengungkit;
- b. mudah dan Cepat;
- c. dampak
- d. memperbaiki;
- e. meyakinkan dan nyata,
- f. independen lainnya.

Pasal 24

Quick wins –RB terdiri atas:

- a. Fasilitasi Pembangunan Kampung KB yang sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mewujudkan Kampung KB di setiap daerah
- b. Mendorong terlaksananya Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja terpilih yang dinilai dalam waktu kurang dari 12 bulan memenuhi kriteria untuk menjadi WBK dan WBBM
- c. Menyiapkan Rancangan Dokumen Sistem Manajemen Talenta
- d. Harmonisasi dan Sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta dokumen SOP/NSPK yang terkait dengan Program KKBPk dan dukungan manajemen pada lingkup tugas BKKBN
- e. Pembangunan e-kinerja yang terintegrasi dengan Manajemen Kinerja BSC

Pasal 25

Program *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilaksanakan oleh Pokja sesuai dengan area perubahannya.

Bagian Kedua
Agenda Prioritas

Pasal 26

Dalam melaksanakan Program *Quick Wins* ditetapkan agenda prioritas yang menjadi kunci pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi Organisasi;
- b. Analisis Jabatan dan Uraian Jabatan;
- c. Pemetaan Kompetensi Pegawai;
- d. Penyempurnaan Proses Bisnis dan SOP BKKBN;
- e. Penetapan Wilayah Bebas Korupsi

BAB VII

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Pasal 27

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah tahapan pelaksanaan kegiatan yang merupakan program mikro pelaksanaan RB-BKKBN
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

Pasal 28

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penguatan Sistem Pengawasan
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- d. Penguatan Kelembagaan
- e. Penguatan Tatalaksana
- f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
- g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- i. Quick Wins

Pasal 29

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diprioritaskan antara lain:

- a. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas; dan
- b. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir

Pasal 30

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diprioritaskan antara lain:

- a. Mendorong Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM;
- b. Mendorong Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- c. Mendorong pelaksanaan *whistle blowing system*: Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
- d. Pembangunan SPIP di lingkungan BKKBN;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 31

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diutamakan dalam Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

Pasal 32

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d adalah difokuskan pada Restrukturisasi kelembagaan dalam rangka pembentukan Struktur Organisasi baru BKKBN.

Pasal 33

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diprioritaskan antara lain:

- a. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Penerapan sistem kearsipan yang handal di masing-masing

Pasal 34

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f diprioritaskan antara lain:

- a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN;
- b. Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai;
- c. Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
- g. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;
- h. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;
- i. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN;
- j. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem;
- k. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN;
- l. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data basis profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN;
- m. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat

Pasal 35

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g diprioritaskan antara lain:

- a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
- b. Menyempurnakan/merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;
- c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan;
- d. perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.

Pasal 36

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h diprioritaskan antara lain:

- a. Penerapan pelayanan terpadu;
- b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan

Pasal 37

Program mikro rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i adalah Percepatan pelayanan KB di kampung KB

BAB VIII

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI

Bagian Pertama

Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 38

Agar dalam pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka dibentuk Tim Pelaksana yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah

- c. Merancang rencana manajemen perubahan;
- d. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
- e. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Peta Jalan RB;
- f. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
- h. Menjadi agen perubahan.

Pasal 42

Tim pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 43

Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan

Pasal 44

- (1) Untuk memantau kemajuan capaian pelaksanaan rencana aksi berdasarkan area perubahan Ketua Tim Pelaksana melaksanakan Rapat RB secara berkala.
- (2) Masing-masing Ketua Pokja melaporkan capaian rencana aksi kepada Ketua Tim dalam Rapat RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing Pokja wajib menghimpun dokumen capaian pelaksanaan dalam bentuk *soft file dan hard file*

ditentukan.

Pasal 39

- (1) Tim pelaksanaan RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah
 - b. Tim Pelaksana
 - c. Tim Asesor Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dipimpin Oleh Kepala BKKBN
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin Oleh Sekretaris Utama
- (4) Tim Assesor Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c selanjutnya disebut dengan Tim PMPRB dipimpin oleh Inpektur Utama

Pasal 40

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Peta Jalan reformasi birokrasi serta menetapkan Peta Jalan;
- b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan

Pasal 41

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Peta Jalan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- b. Merumuskan *quick wins*;

Bagian Ketiga
Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pasal 45

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 46

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan metode Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim PMPRB yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN

Pasal 47

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 difokuskan pada penilaian terhadap langkah-langkah pelaksanaan RB yang dikaitkan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat
Model Penilaian Mandiri

Pasal 49

Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri atas dua komponen antara lain:

- a. Komponen Pengungkit; dan
- b. Komponen Hasil

Pasal 50

- (1) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a merupakan dimensi perbaikan yang meningkatkan kinerja Pemerintah secara berkelanjutan
- (2) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b merupakan keberhasilan tugas instansi yang berhubungan dengan Kepuasan Publik dan Pemangku Kepentingan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 51

Pada saat ditetapkannya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 303/ PER/ B4/ 2015 tentang *Peta Jalan* Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SURYA CHANDRA SURAPATY

Lampiran Peraturan Kepala
 Nomor :
 Tanggal

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 TAHUN 2015-2019**

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya penerapan/ internalisasi asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kerja dan budaya pelayanan	1. Indeks integritas 2. Survey pelayanan masyarakat atas layanan KKBPK 3. Internalisasi budaya kerja 4. Indeks Pelayanan Publik	Pembentukan Tim RB BKKBN Tahun 2015-2019 Sosialisasi dan internalisasi RB di seluruh unit kerja setingkat Eselon II BKKBN hingga Kantor Perwakilan	Sosialisasi dan internalisasi program RB BKKBN Tahun 2015-2019 Internalisasi budaya CETAK TEGAS Pembekalan Agent of Change BKKBN Penyusunan pedoman pengukuran pencapaian budaya CETAK TEGAS Penetapan skala prioritas pembangunan kapasitas Mental Aparatur ASN BKKBN	Perancangan pedoman pengukuran Indeks Integritas BKKBN Ujicoba pengukuran Indeks Integritas BKKBN Revisi Tim Pokja RB dan Pembentukan AoC yang baru berdasarkan hasil Revisi Tim Pencanaan aksi Manajemen Perubahan dan Awareness implementasi RB melalui internalisasi, tagline RB, branding Indikator Sukses RB	Pengukuran capaian Indeks Integritas Pengukuran capaian budaya CETAK TEGAS Pembekalan dan pengembangan kapasitas AoC BKKBN Pelaksanaan aksi peningkatan pengetahuan pegawai BKKBN tentang RB BKKBN 2015-2019 melalui penyebaran Buku Ringkasan RB BKKBN 2015-2019	Pengukuran capaian Indeks Integritas Pengukuran capaian budaya CETAK TEGAS Pembekalan dan pengembangan kapasitas AoC BKKBN Pengukuran Revolusi Mental Aparatur BKKBN Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KKBPK online Monev kinerja AoC	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
				Penyusunan Pedoman Pembangunan Revolusi Mental Aparatur BKKBN Penyusunan pedoman pengukuran kinerja pelayanan KKBPK dan pembangunan e_survey layanankkbpk Ujicoba pengukuran capaian kinerja layanan KKBPK melalui survei online Lomba cipta karya kreativitas branding budaya pelayanan KKBPK Monev kinerja AoC	Ujicoba pengukuran Revolusi Mental Aparatur BKKBN Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KKBPK online Monev kinerja AoC		

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap unit organisasi	1. Internalisasi budaya kerja 2. Survey budaya CETAK TEGAS	Penerapan budaya CETAK TEGAS	Review keberhasilan internalisasi budaya CETAK TEGAS	Penyusunan pedoman pengukuran budaya CETAK TEGAS Rekrutmen AoC penerapan budaya CETAK TEGAS Review dan revisi rencana prioritas implementasi perubahan budaya CETAK TEGAS (from - to) Perancangan branding tagline budaya CETAK TEGAS Sosialisasi dan internalisasi penerapan budaya CETAK TEGAS, melalui seminar, lokakarta, pemasangan tagline budaya, pembagian gimmick budaya, dll	Pengukuran pencapaian budaya CETAK TEGAS Pembekalan agen-agen perubahan budaya di setiap unit kerja setingkat eselon II dan kantor perwakilan seluruh Indonesia Sosialisasi dan internalisasi penerapan budaya CETAK TEGAS, melalui seminar, lokakarta, pemasangan tagline budaya, pembagian gimmick budaya, dll	Pengukuran pencapaian budaya CETAK TEGAS Pembekalan agen-agen perubahan budaya di setiap unit kerja setingkat eselon II dan kantor perwakilan seluruh Indonesia Sosialisasi dan internalisasi penerapan budaya CETAK TEGAS, melalui seminar, lokakarta, pemasangan tagline budaya, pembagian gimmick budaya, dll	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya integritas aparatur	1. Indeks integritas 2. Indeks kapasitas mental aparatur BKBN	Penyiapan bahan monev pelaksanaan nilai-nilai integritas aparatur BKKBN	Monitoring dan evaluasi capaian penerapan nilai integritas BKKBN	Perancangan pedoman pengukuran Indeks Integritas BKKBN Ujicoba pengukuran Indeks Integritas BKKBN Awareness pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan komitmen pembangunan indeks integritas BKKBN	Pengukuran Indeks Integritas BKKBN Awareness pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan komitmen pembangunan indeks integritas BKKBN	Pengukuran Indeks Integritas BKKBN Awareness pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan komitmen pembangunan indeks integritas BKKBN	
Meningkatnya profesionalitas aparatur	1. Jumlah pegawai yang mengikuti program pengembangan kapasitas mental 2. Pengukuran 360° terhadap komponen profesionalitas pegawai	Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas mental aparatur BKKBN	Penyusunan rancangan pengukuran 360° pada komponen profesionalitas dan mental apatur BKKBN	Penyusunan pedoman pengukuran 360° pada komponen profesionalitas aparatur BKKBN Pelatihan dan pengembangan kapasitas mental aparatur BKKBN	Pengukuran 360° pada komponen profesionalitas aparatur BKKBN Pelatihan dan pengembangan kapasitas mental aparatur BKKBN	Pengukuran 360° pada komponen profesionalitas aparatur BKKBN Pelatihan dan pengembangan kapasitas mental aparatur BKKBN	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR							
Meningkatnya citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat	1. Survei persepsi pemangku kepentingan terhadap layanan KKBPK yang berikan aparatur 2. Indeks Pelayanan Publik	Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan survei citra positif pemangku kepentingan terhadap layanan KKBPK	Pelaksanaan survei citra positif pemangku kepentingan terhadap layanan KKBPK	Penyusunan pedoman pengukuran citra positif aparatur BKKBN dengan menggali komponen dan kriteria sukses pelayanan masyarakat Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN Monev dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran	Perumusan kebijakan peningkatan citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN	Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN Monev dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan KKBPK	Penyusunan kerangka acuan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan KKBPK	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan KKBPK	Penyusunan pedoman pengukuran citra positif aparatur BKKBN dengan menggali komponen dan kriteria sukses pelayanan masyarakat	Perumusan kebijakan peningkatan citra positif aparatur BKKBN sebagai pelayan masyarakat	Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN Monev dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
MENTAL APARATUR				Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN	Survei dan pengukuran citra positif aparatur BKKBN		
				Money dan tindak lanjut rekomendasi hasil survei dan pengukuran			

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya kapasitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP	Review tingkat implementasi APIP	Penyusunan naskah akademik Revitalisasi Peran APIP	<p>Penyusunan Rencana Pengembangan APIP berbasis kompetensi pengawasan yang kredibel, profesional dan berintegritas</p> <p>Pengembangan kapasitas mental APIP melalui progam diklat teknis berbasis kompetensi</p> <p>Peningkatan jumlah dan kualifikasi APIP di masing-masing unit kerja</p>	<p>Pengembangan kapasitas mental APIP melalui progam diklat teknis berbasis kompetensi</p> <p>Pengukuran kinerja profesional APIP</p> <p>Penilaian kompetensi dan sertifikasi APIP</p> <p>Rekomendasi tindak lanjut perbaikan kapasitas mental APIP</p>	<p>Pengembangan kapasitas mental APIP melalui progam diklat teknis berbasis kompetensi</p> <p>Pengukuran kinerja profesional APIP</p> <p>Penilaian kompetensi dan sertifikasi APIP</p> <p>Rekomendasi tindak lanjut perbaikan kapasitas mental APIP</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya penerapan Sistem Pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis	Tingkat kematangan implementasi SPIP di semua tingkatan manajemen	Pembentukan tim SPIP Pusat dan pada masing-masing unit kerja setingkat eselon II dan kantor perwakilan	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan internal yang melekat dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KKBPK sesuai dengan OTK Pembekalan tim dalam rangka penyebarluasan metode pengawasan internal melekat pada setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan unit kerja dan kantor perwakilan	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan internal yang melekat dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KKBPK sesuai dengan OTK Pembekalan tim dalam rangka penyebarluasan metode pengawasan internal melekat pada setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan unit kerja dan kantor perwakilan Penyusunan pedoman audit mandiri berbasis online (e_ukurspip) Pembangunan aplikasi SPIP mandiri	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan internal yang melekat dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KKBPK sesuai dengan OTK Pembekalan tim dalam rangka penyebarluasan metode pengawasan internal melekat pada setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan unit kerja dan kantor perwakilan Penilaian mandiri secara online atas pelaksanaan pengawasan internal	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan internal yang melekat dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KKBPK sesuai dengan OTK Pembekalan tim dalam rangka penyebarluasan metode pengawasan internal melekat pada setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan unit kerja dan kantor perwakilan Penilaian mandiri secara online atas pelaksanaan pengawasan internal	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Persepsi Korupsi 2. Tingkat penyelenggaraan rekrutmen CPNS ataupun PPPK yang bebas kolusi dan nepotisme 3. Tingkat penyelenggaraan promosi yang bebas kolusi dan nepotisme 4. Tingkat Benturan Kepentingan 	<p>Perumusan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat satu pintu</p> <p>Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai berbasis online</p> <p>Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan</p>	<p>Pembentukan tim Pengaduan Masyarakat</p> <p>Penyusunan pedoman penanganan pengaduan masyarakat berbasis online</p> <p>Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan</p> <p>Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BKKBN tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BKKBN</p>	<p>Pembangunan sistem aplikasi pengaduan masyarakat online</p> <p>Pengukuran kinerja layanan pengaduan masyarakat</p> <p>Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Kepala BKKBN tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BKKBN</p> <p>Pencanangan WBK dan WBBM serta pengusulan unit kerja WBK dan WBBM</p>	<p>Pengukuran kinerja layanan pengaduan masyarakat</p> <p>Penanganan benturan kepentingan</p> <p>Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan</p> <p>Penyusunan pedoman pengukuran kinerja WBK dan WBBM</p> <p>Monev pencapaian kinerja penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	<p>Pengukuran kinerja layanan pengaduan masyarakat</p> <p>Penanganan benturan kepentingan</p> <p>Penyelenggara-raan seleksi terbuka dalam rangka promosi jabatan</p> <p>Pengukuran WBK dan WBBM pada unit kerja dan seluruh kantor Perwakilan BKKBN</p> <p>Monev pencapaian kinerja penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi	1. Indeks e-Government 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Penyempurnaan proses bisnis dan alur proses birokrasi layanan masyarakat	Penyusunan pedoman penyelenggaraan Good Government BKKBN Penerapan layanan KKBPK yang efektif dan efisien melalui Layanan Satu Pintu Pengukuran indeks e_Government Pembangunan aplikasi e_Government online	Penerapan layanan KKBPK yang efektif dan efisien melalui Layanan Satu Pintu Pengukuran indeks e_Government	Penerapan layanan KKBPK yang efektif dan efisien melalui Layanan Satu Pintu Pengukuran indeks e_Government	
Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur BKKBN	1. Tingkat pengawasan melekat 2. Penurunan tingkat penyimpangan	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan melekat dalam melaksanakan program pembangunan KKBPK	Revitalisasi model pengawasan melekat Pembekalan dan pendampingan oleh AoC dalam mendorong terselenggaranya Waskat	Pemetaan pemanfaatan model Waskat Fasilitasi WBS melalui Peraturan Kepala BKKBN Pembangunan Sistem Pengendalian Kinerja Waskat	Sosialisasi dan internalisasi Waskat Rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas pelaksanaan Waskat dalam melaksanakan program KKBPK	Sosialisasi dan internalisasi Waskat Rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas pelaksanaan Waskat dalam melaksanakan program KKBPK	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN							
Meningkatnya hasil penilaian opini oleh BPK, dan secara konsisten mempertahankan opini WTP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian BPK 2. Tingkat keberhasilan koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam membangun pengawan yang transparan, kredibel, dan bersih dan bebas KKN 	Perumusan model kerjasama sinergi antara unit kerja pengawasan dari internal dan instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengawasan eksternal	<p>Peningkatan kinerja efektivitas Pengawasan Internal</p> <p>Penataan sistem laporan keuangan internal yang dapat memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>)</p>	<p>Penerapan sistem laporan keuangan internal dengan prinsip <i>reasonable assurance</i>, kecukupan pengungkapan, dan memperhatikan asas kepatuhan</p> <p>Monev implementasi sistem laporan keuangan</p>	<p>Penerapan sistem laporan keuangan internal dengan prinsip <i>reasonable assurance</i>, kecukupan pengungkapan, dan memperhatikan asas kepatuhan</p> <p>Monev implementasi sistem laporan keuangan</p>	<p>Penerapan sistem laporan keuangan internal dengan prinsip <i>reasonable assurance</i>, kecukupan pengungkapan, dan memperhatikan asas kepatuhan</p> <p>Monev implementasi sistem laporan keuangan</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
AKUNTABILITAS							
Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	1. Tingkat keselarasan Perencanaan, Pengang-garan, dan Pelaporan Kinerja 2. Tingkat penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard	Review terhadap keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	Penyusunan naskah akademik pembangunan proses bisnis perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi Evaluasi penerapan BSC dalam pengukuran kinerja organisasi	Assessment terhadap keselarasan rencana yang disusun, dengan sistem penganggaran dan pelaporan Pembangunan e_SKP yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Kinerja BSC Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN tentang harmonisasi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta harmonisasi ruang lingkup tugas agar tidak tumpang tindih pekerjaan dan berorientasi hasil (cascading dan alignment secara struktural)	Penerapan SAKIP yang konsisten Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka Monitoring dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	Penerapan SAKIP yang konsisten Pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka Monitoring dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan yang terintegrasi	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
AKUNTABILITAS							
Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional	Tingkat pemanfaatan e_procurement dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKKBN	Mendorong terselenggara-nya pengadaan barang/jasa yang transparan dan profesional melalui e_procurement dan e_catalog	<p>Perencanaan penambahan jumlah dan kualifikasi tenaga fungsional</p> <p>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Peningkatan kompetensi tenaga fungsional</p> <p>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Penyelengga-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment</p>	<p>Peningkatan kompetensi tenaga fungsional</p> <p>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Penyelengga-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment, e_catalog, dan SIKAP</p> <p>Perancangan tentang pemberian Reward & Punishment</p> <p>Monev penyelengga-raan pengadaan barang/jasa</p>	<p>Peningkatan kompetensi tenaga fungsional</p> <p>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Penyelengga-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment, e_catalog, dan SIKAP</p> <p>Pengusulan reward bagi Pengelola PBJP</p> <p>Monev penyelengga-raan pengadaan barang/jasa</p>	<p>Peningkatan kompetensi tenaga fungsional</p> <p>Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Penyelengga-raan pengadaan barang/jasa secara terbuka melalui e_procure-ment, e_catalog, dan SIKAP</p> <p>Monev penyelengga-raan pengadaan barang/jasa</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
KELEMBAGAAN							
Organisasi yang efektif dan efisien, tidak tumpang tindih tugas dan fungsi serta memiliki kejelasan pembagian kewenangan, serta tingkat Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi dan sinergisme (KISS) kelembagaan antara Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia yang jelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi yang ramping dan kaya fungsi 2. Kejelasan tugas dan fungsi dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Pusat dengan kantor Perwakilan BKKBN Provinsi 3. Persentase unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran 	Pelaksanaan audit dan evaluasi kelembagaan	Penyusunan naskah akademik reorganisasi BKKBN yang ramping, kaya fungsi, tidak tumpang tindih, efektif, dan efisien, serta memiliki kewenangan yang jelas dalam pembagiannya	<p>Merancang Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru BKKBN sesuai dengan hasil audit dan evaluasi kelembagaan</p> <p>Menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN</p> <p>Penyusunan instrumen audit kelembagaan</p> <p>Evaluasi dan pemetaan KISS kelembagaan Kantor Pusat dengan Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia</p>	<p>Menyusun peraturan Kepala BKKBN tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKKBN</p> <p>Penyempurnaan instrumen audit kelembagaan berdasarkan SOTK baru BKKBN</p> <p>Ujicoba pelaksanaan audit kelembagaan BKKBN berdasarkan SOTK baru</p> <p>Revisi dokumen Informasi Jabatan, Informasi Faktor Jabatan, dan Beban Kerja</p>	<p>Evaluasi penerapan SOTK baru BKKBN melalui kajian analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan untuk melihat kemungkinan masih terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi</p> <p>Revisi dokumen Informasi Jabatan, Informasi Faktor Jabatan, dan Beban Kerja</p>	
Meningkatnya kinerja aparatur BKKBN	Hasil penilaian kinerja aparatur BKKBN	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja aparatur BKKBN	Penyusunan instrumen pengukuran kinerja aparatur BKKBN yang inline dengan kinerja org.	Pengukuran kinerja aparatur BKKBN dengan menggunakan e_kinerja 360° dan e_SKP	Monev penilaian kinerja aparatur	Monev penilaian kinerja aparatur	
					Tindak lanjut perbaikan hasil monev	Tindak lanjut perbaikan hasil monev	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
TATALAKSANA							
Meningkatnya penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e_government	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen Proses Bisnis yang jelas, lengkap, dan sistematis 2. Tingkat ketersediaan dan penerapan SOP dan/atau NSPK yang baik dan konsisten pada unit kerja dan kantor Perwakilan 3. Indeks e_Government 	Evaluasi proses bisnis, SOP, dan/atau NSPK tata laksana BKKBN	Pemetaan kebutuhan SOP dan/atau NSPK di seluruh unit kerja dan kantor Perwakilan BKKBN di Provinsi	<p>Penyusunan Proses Bisnis BKKBN dari mulai Level 0 (tingkat BKKBN) Level 1 (Kedeputian), hingga tingkatan operasional</p> <p>Revisi SOP/NSKP dan pembuatan SOP/NSPK baru yang belum ada berdasarkan hasil analisis kebutuhan</p> <p>Penyusunan instrumen pengukuran ketatalaksanaan BKKBN</p> <p>Evaluasi ketatalaksanaan</p>	<p>Revisi SOP/NSPK dan pembuatan SOP/NSPK baru yang belum ada berdasarkan hasil analisis kebutuhan</p> <p>Monitoring dan Evaluasi ketatalaksanaan BKKBN</p>	<p>Monev implementasi proses bisnis, SOP dan NSPK</p> <p>Monitoring dan Evaluasi ketatalaksanaan BKKBN</p>	
Meningkatnya kualitas tata hubungan antara kantor Pusat dengan kantor Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia	Tingkat kesesuaian dan harmonisasi hubungan antara tugas dan fungsi dengan proses bisnis yang dijalankan, di antara unit kerja	Pelaksanaan audit dan evaluasi tata hubungan kerja	Penyusunan naskah penyusunan HTCK (Hubungan dan Tata Cara Kerja)	<p>Penyusunan HTCK (Hubungan dan Tata Cara Kerja)</p> <p>Monev pelaksanaan HTCK di antara unit kerja, baik di Pusat maupun kantor Perwakilan</p>	Monev pelaksanaan HTCK di antara unit kerja, baik di Pusat maupun kantor Perwakilan	Monev pelaksanaan HTCK di antara unit kerja, baik di Pusat maupun kantor Perwakilan	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
TATALAKSANA							
Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal	Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan	Evaluasi manajemen kearsipan dan penerapannya	Penyusunan Pedoman tata kelola arsip Penyusunan Blue Print Sistem Informasi Manajemen Kearsipan	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Penataan dan penerapan SOP/NSPK manajemen kearsipan BKKBN Peningkatan kompetensi pelaksana tata kelola arsip	Ujicoba penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Peningkatan kompetensi pelaksana tata kelola arsip Monev penerapan manajemen kearsipan	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Peningkatan kompetensi pelaksana tata kelola arsip Monev penerapan manajemen kearsipan	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Akses dan keterbukaan informasi publik 2. Indeks e_Government 3. Indeks Pelayanan Publik 4. Kecepatan dan ketersediaan akses informasi pembangunan KKBPK yang cepat dan akurat, serta online	Evaluasi capaian program pelayanan publik	Penyusunan pedoman pengukuran e_Government Penyusunan rancangan Sistem Informasi Publik tentang Program Pembangunan KKBPK	Penyusunan instrumen pengukuran evaluasi penerapan e_Government Pembangunan Sistem Informasi yang terintegrasi antara Ketersediaan Capaian Program Pembangunan KKBPK dengan kebutuhan	Pengukuran capaian e-Government, khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan publik Monev penerapan e_Government	Pengukuran capaian e-Government, khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan publik Monev penerapan e_Government	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif	Peningkatan kemampuan pengelola SDM dalam mempercepat program penataan SDM ASN BKKBN	Penyusunan rencana penataan manajemen SDM ASN BKKBN	<p>Penyusunan Peta Jalan manajemen ASN</p> <p>Pemetaan kompetensi pegawai berdasarkan kualifikasi dan tuntutan kompetensi jabatan</p> <p>Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi</p>	<p>Pengusulan penambahan jumlah pegawai pada jabatan fungsional di bidang manajemen ASN (asesor, analis kepegawaian, dsb) dan pengusulan jenis formasi bidang manajemen SDM ASN</p> <p>Penyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi</p> <p>Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi</p>	<p>Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi</p> <p>Monev penerapan dan pencapaian target Peta Jalan Manajemen ASN BKKBN</p> <p>Redistribusi pegawai berdasarkan kompetensi dan standar kompetensinya</p>	<p>Peningkatan kompetensi pengelola SDM melalui diklat berbasis kompetensi</p> <p>Monev penerapan dan pencapaian target Peta Jalan Manajemen ASN BKKBN</p>	
Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen ASN berbasis merit	1. Jenis jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan	Pemetaan NSPK yang diperlukan untuk mendukung implementasi Sistem Merit di BKKBN	Review dan Revisi Kamus Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Penyusunan Standar	Perumusan kamus kompetensi teknis Penyusunan standar kompetensi	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis untuk Jabatan Administrasi dan Fungsional	Evaluasi kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural	

	2. Perencanaan pegawai sesuai beban kerja		Kompetensi Jabatan bagi JPT	administrasi dan fungsional			
HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	UNIT TERKAIT
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
	3. Indeks kompetensi 4. Indeks profesionalitas		<p>Penetapan Peraturan Kepala BKKBN tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi JPT Pratama dan JPT Madya</p> <p>Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka</p> <p>Perumusan dan pengusulan penetapan Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Manajemen Karier ASN BKKBN</p>	<p>Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka</p> <p>Ujicoba penerapan Pedoman Manajemen Karier pada pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan pelaksanaan seleksi terbuka</p> <p>Perumusan pedoman SMART ASN BKKBN</p> <p>Perumusan soal Test Kompetensi Teknis, Manajerial, dan sosial kultural</p>	<p>Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka</p> <p>Penerapan Pedoman Manajemen Karier pada pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan pelaksanaan seleksi terbuka</p> <p>Perumusan soal Test Kompetensi Teknis, Manajerial, dan sosial kultural</p> <p>Monev penerapan manajemen ASN berbasis merit</p>	<p>Pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pemetaan dan seleksi terbuka</p> <p>Penerapan Pedoman Manajemen Karier pada pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan pelaksanaan seleksi terbuka</p> <p>Monev penerapan manajemen ASN berbasis merit</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesiapan dalam menerapkan e_SKP yang inline dengan IKU dan IKK organisasi 2. Ketersediaan dokumen petunjuk pelaksana penerapan manajemen kinerja 	Pemetaan tingkat pencapaian dan keberhasilan dalam menerapkan manajemen kinerja individu berdasarkan PP 46 Tahun 2011	Review dan revisi Pedoman Manajemen Kinerja Individu	<p>Penyempurnaan aplikasi Manajemen Kinerja Individu yang terintegrasi dengan Manajemen Kinerja Organisasi BKKBN berbasis BSC Ujicoba penerapan hasil e_SKP untuk mendukung talent pool dan SMART ASN</p> <p>Penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen kinerja individu BKKBN</p> <p>Pembangunan sistem aplikasi penilaian kinerja 360°</p> <p>Pelaksanaan penilaian 360° untuk mendukung nilai pada talent pool dan SMART ASN</p>	<p>Penerapan e_SKP untuk mendukung talent pool dan SMART ASN</p> <p>Pelaksanaan penilaian 360° untuk mendukung nilai pada talent pool dan SMART ASN</p> <p>Monev penerapan manajemen kinerja individu</p>	<p>Penerapan e_SKP untuk mendukung talent pool dan SMART ASN</p> <p>Pelaksanaan penilaian 360° untuk mendukung nilai pada talent pool dan SMART ASN</p> <p>Monev penerapan manajemen kinerja individu</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungan BKBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesiapan organisasi dalam melaksanakan proram Rencana Suksesi dan Manajemen Talenta 2. Tingkat kesiapan pelaksanaan seleksi terbuka yang adil, transparan, dan profesional 3. Ketersediaan talent pool yang siap untuk mendukung Rencana Suksesi 	Pemetaan kebutuhan proses menuju sistem manajemen talenta	<p>Penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala BKKBN tentang pedoman Seleksi Terbuka</p> <p>Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis seleksi terbuka</p> <p>Perancangan Assessment Center BKKBN</p>	<p>Penyusunan pedoman manajemen talenta</p> <p>Penyusunan pedoman Rencana Suksesi</p> <p>Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN tentang Penilaian Kompetensi ASN BKKBN melalui assessment center</p> <p>Pendirian Assessment Center BKKBN</p> <p>Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis talent pool, dan SMART ASN</p>	<p>Penyusunan pedoman pengembangan kompetensi</p> <p>Transisi pelaksanaan promosi melalui seleksi terbuka menuju rencana suksei berdasarkan manajemen talenta BKKBN</p> <p>Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis talent pool, dan SMART ASN</p> <p>Penyiapan instrumen akreditasi assessment center BKKBN</p> <p>Pemanfaatan assessment center untuk pelaksanaan assessmen mandiri</p>	<p>Penilaian kompetensi pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi, data basis talent pool, dan SMART ASN</p> <p>Pelaksanaan promosi melalui rencana suksei berdasarkan manajemen talenta BKKBN</p> <p>Pemanfaatan assessment center untuk pelaksanaan assessmen mandiri</p> <p>Pengusulan borang akreditasi assessment center BKKBN ke BKN</p> <p>Monev penerapan sistem manajemen talenta</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi	<p>1. Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen ASN yang sejalan dengan SIM ASN Nasional</p> <p>2. Pengintegrasian seluruh sistem informasi manajemen SDM yang telah dikembangkan dan yang akan dikembangkan</p>	Pemetaan dan analisis kebutuhan aplikasi dalam Sistem Manajemen ASN BKKBN	Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN BKKBN	<p>Pembangunan aplikasi penilaian kompetensi</p> <p>Pembangunan aplikasi pengembangan kompetensi berdasarkan hasil penilaian kesenjangan kompetensi</p> <p>Pembangunan aplikasi Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi</p> <p>Pembangunan aplikasi CAT Online</p> <p>Migrasi data dan pengintegrasian seluruh sistem Manajemen SDM ke dalam Sistem Basis Data Kepegawaian BKKBN</p>	<p>Ujicoba Sistem Informasi Manajemen ASN BKKBN yang telah terintegrasi dalam pemanfaatan untuk Promosi, Mutasi, Suksesi Kepemimpinan, Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Karier, dsb</p> <p>Pembangunan aplikasi Audit SDM</p> <p>Penggunaan CAT Online untuk mendukung assesmnt center BKKBN dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai</p> <p>Monev dan pemeliharaan Sistem Informasi ASN BKKBN secara berkala</p>	<p>Ujicoba pemanfaatan aplikasi Audit SDM untuk melakukan audit SDM di lingkungan BKKBN</p> <p>Penggunaan CAT Online untuk mendukung assesmnt center BKKBN dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai</p> <p>Monev dan pemeliharaan Sistem Informasi ASN BKKBN secara berkala</p>	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA							
Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks kedisiplinan	Pengumpulan data penerapan disiplin pegawai	Kajian analisis jenis dan penyebab pelanggaran disiplin	Penyusunan pedoman akuntabilitas aparatur ASN BKKBN Pembangunan sistem informasi Bimbingan Konseling Pegawai BKKBN Monev penegakkan disiplin pegawai	Pendampingan bagi pegawai yang memiliki masalah kedisiplinan melalui bimbingan konseling Monev penegakan disiplin pegawai	Pendampingan bagi pegawai yang memiliki masalah kedisiplinan melalui bimbingan konseling Monev penegakan disiplin pegawai	

HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR	KEGIATAN YANG DILAKUKAN					UNIT TERKAIT
		2015	2016	2017	2018	2019	
PELAYANAN PUBLIK							
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik	1. Tingkat kepatuhan terhadap SOP kinerja pelayanan publik 2. Survei kepuasan publik terhadap kinerja layanan pembangunan KKBPK	Penyiapan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Validasi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Pelaksanaan survei kepuasan publik Pendirian ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter Monev kinerja pelayanan publik	Pelaksanaan survei kepuasan publik Pemanfaatan ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter Monev kinerja pelayanan publik	Pelaksanaan survei kepuasan publik Pemanfaatan ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter Monev kinerja pelayanan publik	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	1. Jumlah inovasi pelayanan publik berhasil diusulkan dan dimanfaatkan	Inventarisasi keluaran pegawai, khususnya yang berpotensi untuk penerapan	Pemetaan kualitas pelayanan publik Monev peningkatan kualitas pelayanan Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur pelayanan publik, baik <i>soft</i> maupun <i>hard</i> Monev peningkatan kualitas pelayanan Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	Monev peningkatan kualitas pelayanan Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	Monev peningkatan kualitas pelayanan Penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemetaan kualitas pelayanan publik	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SURYA CHANDRA SURAPATY